

Peningkatan Kualitas Pembelajaran: Peran Majelis Pendidikan dalam Inovasi dan Teknologi Pendidikan

Mukhlis

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Jami Banjarmasin
mukhlis@staialjami.ac.id

Abstract

This study examines the role of the Education Council in improving educational standards. The main focus of the research is on curriculum development, quality monitoring, teacher training and development, facility enhancement, evaluation and accreditation, and collaboration with stakeholders. These functions include curriculum design, setting evaluation guidelines, and the development and training of educators. With the presence of the Education Council, it is expected that there will be alignment between educational policies and their implementation on the ground, ensuring that educational standards are consistently and effectively met. Additionally, the Education Council acts as a facilitator of educational innovation. It plays a role in facilitating research, development, and application of the latest educational technologies that can enhance the quality of learning. Collaboration between the Education Council and various stakeholders, such as the government, educational institutions, parents, and the community, is crucial for the success of the education system. The research method used is library research. This study employs a library research approach based on a search of several articles, journals, and other scholarly works related to the keywords provided. The researcher then collects, analyzes, and selects these sources to draw conclusions. The results of the study indicate that the Education Council plays a vital role in enhancing educational standards. The Council can contribute to improving education quality by providing a relevant curriculum, monitoring quality, training teachers, developing facilities, conducting evaluations and accreditations, collaborating with stakeholders, advancing educational technology, and raising public awareness. Quality monitoring by the Education Council can help improve student achievements, as students receive better and higher-quality education. Teacher training provided by the Education Council can also enhance teachers' abilities, leading to more effective education. Collaboration with stakeholders further helps build public trust in the education system, as the community can see that the education system is being managed well and effectively.

Keywords: Role, Education Council, Education Standards

Abstrak

Penelitian ini mengkaji peran Majelis Pendidikan dalam peningkatan standar pendidikan. Fokus utama dari penelitian ini terletak pada pengembangan kurikulum, pengawasan kualitas pendidikan, pelatihan dan pengembangan guru, pengembangan fasilitas pendidikan, evaluasi dan akreditasi dan kerja sama dengan stakeholder. Fungsi ini mencakup penyusunan kurikulum, penetapan pedoman evaluasi, serta pengembangan dan pelatihan bagi tenaga pendidik. Dengan adanya Majelis Pendidikan, diharapkan adanya keselarasan antara kebijakan pendidikan dengan pelaksanaan di lapangan, sehingga standar pendidikan dapat dipenuhi secara konsisten dan efektif. Selain itu, Majelis Pendidikan berperan sebagai fasilitator inovasi dalam pendidikan. Majelis Pendidikan berperan dalam memfasilitasi penelitian,

pengembangan, dan penerapan teknologi pendidikan terbaru yang dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Kolaborasi antara Majelis Pendidikan dan berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah, lembaga pendidikan, orang tua, dan masyarakat, sangat penting untuk keberhasilan sistem Pendidikan. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian kepustakaan (library research), Penelitian ini menggunakan jenis penelitian library berdasarkan pencarian dari beberapa artikel, jurnal, karya ilmiah lainnya yang terkait dengan kata kunci yang sudah disusun, selanjutnya peneliti mengumpulkan dan menganalisis serta menyeleksi semua sumber tersebut untuk diambil simpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Majelis Pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam peningkatan standar pendidikan. Majelis Pendidikan dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan dengan memberikan kurikulum yang relevan, pengawasan kualitas, pelatihan guru, pengembangan fasilitas, evaluasi dan akreditasi, kerja sama dengan stakeholder, pengembangan teknologi pendidikan dan peningkatan kesadaran masyarakat. Pengawasan kualitas oleh Majelis Pendidikan dapat membantu meningkatkan prestasi siswa, karena siswa dapat memperoleh pendidikan yang lebih baik dan lebih berkualitas. Pelatihan guru yang diberikan oleh Majelis Pendidikan juga dapat meningkatkan kemampuan guru, sehingga dapat memberikan pendidikan yang lebih efektif. Kerja sama dengan stakeholder juga membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pendidikan, karena masyarakat dapat melihat bahwa sistem pendidikan dijalankan dengan baik dan efektif.

Kata kunci: Peran, Majelis pendidikan, Standar Pendidikan

A. Pendahuluan

Pendidikan adalah pilar utama dalam pembangunan suatu bangsa dan pengembangan individu. Untuk mencapai tujuan pendidikan yang optimal, diperlukan upaya sistematis dan terstruktur yang melibatkan berbagai pihak, termasuk lembaga-lembaga yang memiliki tanggung jawab dalam kebijakan pendidikan. Salah satu lembaga yang memainkan peran krusial dalam hal ini adalah Majelis Pendidikan. Majelis Pendidikan bertugas untuk memastikan bahwa standar pendidikan yang diterapkan memenuhi kriteria kualitas yang tinggi dan relevan dengan kebutuhan masyarakat serta perkembangan zaman. Pendidikan merupakan salah satu aspek yang paling penting dalam pembangunan suatu bangsa. Dalam konteks ini, peran majelis pendidikan menjadi sangat signifikan dalam meningkatkan standar pendidikan. Majelis pendidikan adalah lembaga yang bertugas mengelola dan meningkatkan mutu pendidikan, terutama dalam mengembangkan kurikulum, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan memastikan bahwa pendidikan yang disampaikan memiliki standar yang tinggi.

Sebagai lembaga pengatur dan pengawas, Majelis Pendidikan memiliki tanggung jawab utama dalam merancang, menetapkan, dan mengevaluasi standar pendidikan. Fungsi ini mencakup penyusunan kurikulum, penetapan pedoman evaluasi, serta pengembangan dan pelatihan bagi tenaga pendidik. Dengan adanya Majelis Pendidikan, diharapkan adanya keselarasan antara kebijakan pendidikan dengan pelaksanaan di lapangan, sehingga standar pendidikan dapat dipenuhi secara konsisten dan efektif.

Selain itu, Majelis Pendidikan berperan sebagai fasilitator inovasi dalam pendidikan. Dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi yang pesat, metode pengajaran dan kurikulum harus senantiasa diperbarui agar tetap relevan. Majelis Pendidikan berperan dalam memfasilitasi penelitian, pengembangan, dan penerapan teknologi pendidikan terbaru yang dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Inovasi ini penting untuk menjaga agar sistem

pendidikan tidak hanya beradaptasi dengan perubahan, tetapi juga memimpin dalam menghadapi tantangan masa depan.

Kolaborasi antara Majelis Pendidikan dan berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah, lembaga pendidikan, orang tua, dan masyarakat, sangat penting untuk keberhasilan sistem pendidikan. Majelis Pendidikan harus mampu menjembatani kebutuhan dan harapan dari berbagai pihak untuk merumuskan kebijakan yang inklusif dan efektif. Dengan pendekatan kolaboratif ini, kebijakan pendidikan dapat lebih responsif terhadap tantangan dan kebutuhan yang berkembang. Namun, meningkatkan standar pendidikan bukanlah tugas yang mudah. Berbagai faktor, seperti manajemen, kurikulum, dan kualitas sumber daya manusia, mempengaruhi kualitas pendidikan. Oleh karena itu, peran majelis pendidikan tidak hanya terbatas pada pengembangan kurikulum, tetapi juga melibatkan perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian dalam proses pendidikan

Adapun fokus dari penelitian yang ada di artikel ini akan membahas lebih lanjut mengenai peran Majelis Pendidikan dalam meningkatkan standar pendidikan. Fokus utama akan diletakkan pada pengembangan kurikulum, pengawasan kualitas pendidikan, pelatihan dan pengembangan guru, pengembangan fasilitas pendidikan, evaluasi dan akreditasi, dan bekerja sama dengan stakeholder yang dilakukan oleh Majelis Pendidikan.

B. Landasan Teori

1. Konsep Peran

Peran adalah fungsi atau posisi yang dijalankan seseorang dalam konteks tertentu, seperti dalam kelompok, organisasi, atau masyarakat. Misalnya, dalam sebuah tim kerja, peran seseorang bisa berupa pemimpin, anggota tim, atau pengamat. Setiap peran memiliki tanggung jawab dan tugas spesifik yang harus dilaksanakan. Di luar konteks pekerjaan, peran juga bisa merujuk pada posisi seseorang dalam hubungan sosial, seperti peran sebagai orang tua, teman, atau pasangan. Peran yang digambarkan dalam Status, Tempat dan Peran dalam Masyarakat, dapat dijelaskan dengan banyak cara, itulah interpretasi sejarah yang pertama. Menurut interpretasi sejarah, konsep peran awalnya dipinjam dari mereka yang memiliki hubungan dekat dengan drama atau teater yang berkembang di zaman Yunani atau Romawi. Dalam hal ini, peran berarti tokoh yang diperankan oleh seorang aktor atau diperankan dalam suatu adegan lakon tertentu. Kedua, konsep peran menurut ilmu-ilmu sosial. Peran dalam ilmu-ilmu sosial adalah suatu fungsi yang dilakukan seseorang ketika menduduki suatu jabatan tertentu, seseorang dapat menjalankan fungsinya karena jabatan yang didudukinya.¹ Dalam psikologi, peran sering kali terkait dengan bagaimana seseorang berfungsi dan berperilaku dalam berbagai situasi sosial atau peran sosial yang diharapkan dari mereka. Secara umum, memahami peran membantu individu menjalankan tanggung jawab mereka dengan lebih efektif dan beradaptasi dengan berbagai situasi yang mereka hadapi.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), peran diartikan sebagai sekumpulan tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh seseorang yang berkedudukan dalam masyarakat dan harus dilaksanakan.² Menurut Gross, Mason, dan McEachern, peran merupakan seperangkat harapan yang dikenakan pada individu yang menduduki kedudukan sosial tertentu.

¹ Irwan Fathurrochman et al., 'Peran Majelis Pendidikan Dasar Dan Menengah Muhammadiyah Dalam Pengembangan Lembaga Pendidikan Di Kabupaten Kepahiang', *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam* 14, no. 1 (2022): 201–25, <http://ejournal.iaida.ac.id/index.php/darussalam/article/view/1808>.

² Rohmat Mulyana Sapdi, 'Peran Guru Dalam Membangun Pendidikan Karakter Di Era Society 5.0', *Jurnal Basicedu* 7, no. 1 (2023): 993–1001, <https://jbasic.org/index.php/basicedu/article/view/4730>.

Ini mencakup harapan-harapan yang diharapkan masyarakat terhadap perilaku individu dalam konteks sosial. Peran juga didefinisikan sebagai aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh individu, yang mencerminkan pola perilaku yang diharapkan dari seseorang sesuai dengan status atau posisinya dalam suatu organisasi atau sistem sosial.³

2. Majelis pendidikan

Majelis Pendidikan merujuk pada lembaga atau badan yang memiliki tanggung jawab dalam pengembangan, pengelolaan, dan pengawasan pendidikan. Biasanya, majelis ini berfungsi sebagai wadah untuk merumuskan kebijakan pendidikan, memberikan bimbingan, dan memastikan kualitas pendidikan di suatu institusi atau komunitas. Majelis pendidikan adalah lembaga atau badan yang memiliki tanggung jawab untuk mengelola, merancang, dan mengawasi kebijakan serta praktik pendidikan dalam suatu sistem pendidikan. Lembaga ini berfungsi sebagai platform bagi berbagai pemangku kepentingan dalam sistem pendidikan untuk berkolaborasi dan mengambil keputusan terkait aspek-aspek penting dari pendidikan. Majelis pendidikan dapat beroperasi di berbagai tingkat administrasi, mulai dari tingkat lokal (sekolah), tingkat regional (dinas pendidikan), hingga tingkat nasional (kementerian pendidikan). Biasanya, majelis pendidikan berperan dalam merumuskan kebijakan pendidikan, menyusun kurikulum, mengawasi pelaksanaan pendidikan, dan melakukan evaluasi terhadap kualitas pendidikan. Majelis Pendidikan dapat mencakup berbagai jenis organisasi, tergantung pada konteks dan tujuan yang diinginkan.

Berikut beberapa contoh jenis organisasi yang terkait dengan pendidikan dan dapat dianggap sebagai Majelis Pendidikan:

- 1) Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen): Organisasi ini merupakan salah satu komponen pembantu pimpinan dalam persyarikatan Muhammadiyah. Dikdasmen memiliki tugas pelaksana kegiatan pokok atau kegiatan teknis, serta pelaksanaan kegiatan pelayanan. Majelis ini lahir sejak masa KH. Ahmad Dahlan dan telah berkembang menjadi lembaga yang lebih kompleks dalam pengelolaan pendidikan.⁴
- 2) Majelis Pendidikan dan Pengajaran Muhammadiyah: Majelis ini bertugas menangani sekolah milik Muhammadiyah. Pembentukannya bermula dari pembentukan Bagian Sekolah pada tahun 1920 dan telah berkembang menjadi lembaga yang penting dalam pengelolaan pendidikan Islam.⁵
- 3) Majelis Pendidikan Daerah (MPD): Lembaga ini resmi dan diakui dalam pemerintahan Aceh, ditugaskan sebagai bagian dari memajukan dan memberi penilaian tentang pendidikan di Aceh kepada pemerintah daerah kabupaten/kota.⁶

³ ega Putri Sulastina, 'Dakwah Bi Al-Hal Karang Taruna Hubbul Watthan Di Desa Talang Empat Karang Tinggi Bengkulu Tengah' UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2023), <http://repository.uinfasbengkulu.ac.id/id/eprint/1539>.

⁴ Irwan Fathurrochman et al., 'Peran Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Muhammadiyah Dalam Pengembangan Lembaga Pendidikan DI Kabupaten Kepahiang', *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam* 14, no. 1 (2022): 201–25, <http://ejournal.iaida.ac.id/index.php/darussalam/article/view/1808>.

⁵ 'Majelis Pendidikan dan Pengajaran Muhammadiyah', in *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, 12 June 2023, https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Majelis_Pendidikan_dan_Pengajaran_Muhammadiyah&oldid=23668709.

⁶ Refi Syaputra, Amiruddin Siahaan, and Candra Wijaya, 'Manajemen Majelis Pendidikan Daerah (Mpd) Dalam Memberikan pelayanan Pendidikan Di Kota Subulussalam Provinsi Aceh', *At-Tazakki: Jurnal Kajian Ilmu*

- 4) Majelis Pendidikan Tinggi: Salah satu majelis dalam organisasi Muhammadiyah yang bertugas mengelola dan mengembangkan pendidikan tinggi. Majelis ini memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan tinggi.⁷
- 5) Komite Sekolah: Organisasi formal yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan. Komite Sekolah memiliki peran penting dalam pengelolaan sekolah dan meningkatkan kualitas pendidikan.⁸

Dengan demikian, Majelis Pendidikan dapat mencakup berbagai jenis organisasi yang berfokus pada pengembangan, pengelolaan, dan pemberdayaan pendidikan di berbagai tingkatan dan konteks.

3. Standar pendidikan

Standar adalah pedoman, kriteria, atau ukuran yang ditetapkan untuk menilai kualitas, performa, atau konsistensi suatu produk, proses, layanan, atau sistem. Standar bertujuan untuk memastikan bahwa sesuatu memenuhi tingkat kualitas tertentu dan berfungsi dengan baik dalam konteks yang telah ditentukan. Standar sering kali berfungsi sebagai pedoman untuk menentukan seberapa baik atau efektif sesuatu harus dilakukan. Ini mencakup spesifikasi teknis, prosedur, atau metrik yang harus diikuti untuk mencapai hasil yang diinginkan. Menyediakan pedoman untuk kurikulum, penilaian, dan pengajaran dalam sistem pendidikan. Dalam konteks pendidikan di Indonesia, istilah “ Standar Nasional Pendidikan (SNP), yang merupakan kriteria minimal terkait sistem pendidikan yang harus dipenuhi oleh penyelenggara pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar Nasional Pendidikan bertujuan untuk menjamin mutu pendidikan nasional, mencerdaskan pendidikan bangsa dan membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat. Standar Nasional Pendidikan disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.⁹

Secara nasional standar mutu pendidikan merujuk kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) meliputi:

- a. Standar kompetensi lulusan, merupakan kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan.
- b. Standar isi adalah kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
- c. Standar proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.

Pendidikan Islam Dan Humaniora 2, no. 2 (2018): 235–48, <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/2962667>.

⁷ ‘Majelis | Muhammadiyah’, Majelis | Muhammadiyah, accessed 7 September 2024, <http://arsip.muhammadiyah.or.id/content-46-det-majelis.html>.

⁸ Lia Yuliana, ‘Peran Komite Sekolah Dalam Mewujudkan Sekolah Efektif’, *Jurnal Ilmiah WUNY* 18, no. 2 (2016): 1–116,.

⁹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, ‘Standar Nasional Pendidikan’, *Jakarta. Departemen Pendidikan Nasional*, 2005,

- d. Standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria mengenai pendidikan dan kelayakan maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan.
- e. Standar sarana dan prasarana adalah kriteria mengenai ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.¹⁰

C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian kepustakaan (library research), Penelitian ini menggunakan jenis penelitian library berdasarkan pencarian dari beberapa artikel, jurnal, karya ilmiah lainnya yang terkait dengan kata kunci yang sudah disusun, selanjutnya peneliti mengumpulkan dan menganalisis serta menyeleksi semua sumber tersebut untuk diambil simpulan.¹¹ Peneliti melakukan akses pada referensi yang terbaru untuk memastikan bahwa sumber yang dijadikan sebagai referensi merupakan sumber yang mempunyai kredibilitas yang tinggi sehingga bisa meningkatkan kualitas hasil penelitian yang ditemukan, Peneliti juga mencatat setiap referensi yang didapat untuk mempermudah melakukan literatur review sehingga setiap referensi yang sudah dikumpulkan dengan mudah untuk melakukan evaluasi, yang nantinya bisa dijadikan sebagai sumber kutipan dalam penelitian kepustakaan ini.

D. Hasil dan Pembahasan

Majelis Pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan standar pendidikan di suatu daerah atau negara. Majelis Pendidikan bertugas merumuskan dan menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan standar pendidikan. Kebijakan ini mencakup pembuatan regulasi dan pedoman yang mendukung perbaikan kualitas pendidikan. Kebijakan ini sering kali melibatkan penyesuaian terhadap kurikulum, metode pengajaran, dan penilaian, dengan tujuan menciptakan standar pendidikan yang lebih tinggi.

Majelis pendidikan juga berperan sebagai pengembang dan pengawas pendidikan, serta sebagai wadah pembinaan bagi guru dan sekolah. Berikut adalah peran Majelis Pendidikan dalam peningkatan standar pendidikan:

1. Pengembangan Kurikulum

Kurikulum merupakan bagian penting dari proses pendidikan. Ini mengacu pada penentuan arah, isi, dan proses pendidikan, dan pada akhirnya menentukan sifat dan kualifikasi lulusan lembaga. Setiap silabus memiliki bagian-bagian yang mendukung pelaksanaan silabus pada tingkat unit. Kurikulum sebagai model diseminasi materi proses pembelajaran yang disusun dan dilaksanakan oleh seluruh satuan pendidikan. Dengan mempertimbangkan minat, bakat, dan keterampilan siswa yang ada, desain kurikulum yang berbeda ini memberikan gambaran lengkap tentang model kurikulum seperti apa yang harus diterapkan oleh sebuah lembaga. Memilih bentuk organisasi yang tepat memfasilitasi pembelajaran yang diharapkan dan memberikan hasil terbaik.

¹⁰ Mokh Fakhruddin Siswopranoto, 'Standar Mutu Pendidikan', *Al-Idaroh: Jurnal Studi Manajemen Pendidikan Islam* 6, no. 1 (17 March 2022): 17–29, <https://doi.org/10.54437/alidaroh.v6i1.372>.

¹¹ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2008), <https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=zG9sDAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA78&dq=metode+penelitian+kepustakaan+&ots=P99jhTESZy&sig=v5xD9hCtIECX2SKrZsg5ATzOgMo>.

Silabus disebut juga rencana studi, atau rencana program studi, tanpa silabus yang baik dan benar sulit tercapai tujuan dan sasaran pendidikan. Sebagai bagian penting dari kurikulum, dituntut agar dapat mengikuti perkembangan dan tuntutan zaman. Hal tersebut merupakan salah satu unsur pengembangan kurikulum yang harus dilakukan untuk mencapai kompetensi peserta didik agar dapat bertahan di era milenial.¹²

Kurikulum merupakan suatu program yang disediakan untuk siswa, Program pendidikan dalam bentuk kegiatan belajar, tujuannya untuk meningkatkan perkembangan dan pertumbuhan siswa yang disesuaikan dengan tujuan pendidikan. Pengembangan kurikulum merupakan suatu proses yang menyeluruh sebagai bentuk kebijakan nasional dalam pendidikan yang disesuaikan dengan visi, misi dan strategi yang dimiliki dari pendidikan nasional. Proses pengembangan kurikulum mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.¹³

Pengembangan kurikulum merupakan salah satu aspek kunci yang harus dilakukan dalam dunia pendidikan. Majelis Pendidikan berperan dalam pengembangan kurikulum yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kurikulum yang baik dapat membantu meningkatkan standar pendidikan dengan memberikan pendekatan yang efektif dalam mengajar dan belajar. Ada empat tahap pengembangan kurikulum dilihat dari tingkatannya antara lain:

1) Pengembangan kurikulum pada tingkat nasional.

Pengembangan kurikulum pada tingkat ini membahas pendidikan pada tingkat nasional yang terdiri dari pendidikan formal, informal, dan non formal. Dari tingkatannya dapat dilihat secara vertikal dan horizontal. Secara vertikal, pengembangan kurikulum dilakukan berdasarkan tingkatan pendidikan dari yang terendah sampai ke tinggi. Sedangkan Secara horizontal, pengembangan kurikulum berdasarkan pendidikan yang sederajat, seperti contoh SD, MI, dan program paket A.

2) Pengembangan kurikulum pada tingkat institusi

Pengembangan kurikulum tingkat ini memiliki beberapa kegiatan yang harus dilaksanakan antara lain, merumuskan tujuan yang akan dicapai sekolah, menyusun SKL (standar kompetensi lulusan), dan penetapan isi kurikulum secara keseluruhan. Standar kompetensi lulusan berupa rumusan kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dicapai oleh siswa setelah mengikuti pembelajaran pada lembaga pendidikan. SKL tersebut dirumuskan sesuai dengan jenis dan tingkatannya. Standar kompetensi lulusan menunjukkan harapan masyarakat, seperti orangtua, pejabat pemerintah dan swasta tentang dunia pendidikan, dunia usaha, dan lain-lain, serta merupakan harapan bagi pendidikan jenjang tinggi atau dunia kerja.

3) Pengembangan kurikulum pada tingkat mata pelajaran

Silabus merupakan bentuk pengembangan kurikulum pada tingkat mata pelajaran. Silabus yang terdiri dari kompetensi inti, kompetensi dasar, materi pokok, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian, bentuk penilaian dan alokasi waktu disusun pada setiap semester.

4) Pengembangan kurikulum pada tingkat pembelajaran di kelas

Pada tingkat pembelajaran di kelas pengembangan kurikulum dilakukan dalam bentuk susunan RPP (Rencana Pelaksanaan Pendidikan) yang dirancang

¹² Rafik Tri Hardian and Hendro Widodo, 'Pengembangan Kurikulum Ismuba Di SMP Muhammadiyah Muntilan', *Urwatul Wutsqo: Jurnal Studi Kependidikan Dan Keislaman* 12, no. 2 (2023): 338–51.

¹³ Karima Nabila Fajri, 'Proses Pengembangan Kurikulum', *Islamika* 1, no. 2 (2019): 35–48.

oleh masing-masing guru. Perencanaan tersebut juga meliputi sumber belajar yang akan digunakan.¹⁴

Penjelasan di atas merupakan bentuk pengembangan kurikulum pada tiap-tiap tingkatannya. Masing-masing tingkatan memiliki tugas masing-masing dalam proses pengembangan kurikulum, akan tetapi tetap disesuaikan dengan tujuan pendidikan nasional. Sedangkan menurut Hamalik proses pengembangan kurikulum yang digunakan di Indonesia dimulai dengan melihat kebutuhan yang ada. Dari studi kebutuhan serta kelayakan kemudian menyusun rencana kurikulum, rencana awal dikembangkan menjadi rencana yang akan diterapkan dalam pelaksanaan kurikulum. Rencana tersebut di uji coba terlebih dahulu di lapangan sebelum kurikulum dilaksanakan secara menyeluruh. Setelah dilaksanakan secara menyeluruh kemudian dilakukan penilaian untuk melihat tingkat keberhasilan kurikulum. Hasil penilaian dapat digunakan untuk perbaikan kurikulum yang telah ada.

Dengan itu Majelis Pendidikan berperan dalam mengkaji dan memperbarui kurikulum untuk memastikan relevansi dan kualitas materi ajar. Ini termasuk penyesuaian dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan pasar kerja. Adapun pembaharuan kurikulum bertujuan untuk meningkatkan kompetensi siswa dan kesiapan mereka untuk menghadapi tantangan di masa depan.

2. Pengawasan Kualitas Pendidikan

Pengawasan pendidikan merupakan proses sistematis yang dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh proses pendidikan di tiap instansi pendidikan berjalan dengan lancar, sesuai dengan standar dan prosedur yang ada serta memastikan kalau proses pendidikan mencapai tujuan Pendidikan.¹⁵

Kualitas pendidikan adalah suatu pilar untuk mengembangkan sumber daya manusia (SDM) yang mana suatu masa depan bangsa itu terletak pada keberadaan kualitas pendidikan yang berada pada masa kini. Suatu pendidikan yang berkualitas akan muncul apabila terdapat manajemen sekolah yang bagus. Mutu juga merupakan suatu ajang berkompetisi yang sangat penting, karena itu merupakan suatu wahana untuk meningkatkan mutu produk layanan jasa. Dengan demikian mewujudkan suatu pendidikan yang bermutu adalah penting, sebagai upaya peningkatan masa depan bangsa sekaligus sebagian dari produk layanan jasa.¹⁶

Secara nasional standar mutu pendidikan merujuk kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) meliputi:

- 1) Standar kompetensi lulusan kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan.
- 2) Standar isi adalah kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
- 3) Standar proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.

¹⁴ Diana Riski Sapitri Siregar, 'Desain Pengembangan Kurikulum', *Jurnal Mahasiswa Pendidikan* 2, no. 2 (2022): 146–57.

¹⁵ Abd Rahman, 'Supervisi Dan Pengawasan Dalam Pendidikan', *PILAR* 12, no. 2 (2021): 50–65.

¹⁶ Alfian Tri Kuntoro, 'Manajemen Mutu Pendidikan Islam', *Jurnal Kependidikan* 7, no. 1 (2019): 84–

- 4) Standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria mengenai pendidikan penjabatan dan kelayakan maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan.
- 5) Standar sarana dan prasarana adalah kriteria mengenai ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.
- 6) Standar pengelolaan adalah kriteria mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan.
- 7) Standar pembiayaan adalah kriteria mengenai komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun.
- 8) Standar penilaian pendidikan adalah kriteria mengenai mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik.¹⁷

Maka Majelis pendidikan bertanggung jawab dalam mengawasi kualitas pendidikan di suatu daerah atau negara. Mereka memantau kualitas guru, fasilitas, dan materi pendidikan untuk memastikan bahwa standar pendidikan terpenuhi.

3. Pelatihan dan Pengembangan Guru

Pelatihan memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap efektivitas sebuah sekolah. Pelatihan memberi kesempatan kepada guru untuk mendapatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap baru yang mengubah perilakunya, yang pada akhirnya akan meningkatkan prestasi belajar siswa. Menurut Finks dan Willits "Hampir semua organisasi besar memiliki program untuk pelatihan dan pengembangan pekerja. Aktivitas pelatihan terkait dengan keterampilan dan terjadi pada semua tingkat organisasi."

Pelatihan sering tidak memenuhi hasil sebagaimana yang diharapkan oleh penyelenggaranya. Karena itu, penyelenggara pelatihan profesional harus merencanakan dengan matang setiap pelatihan, mulai dari pemilihan materi, waktu, tempat, metode, hingga kualitas instruktur.¹⁸

Dan sudah menjadi tugas Majelis pendidikan memberikan pelatihan dan pengembangan guru untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mengajar dan belajar. Guru yang kompeten dapat membantu meningkatkan standar pendidikan dengan memberikan pendekatan yang efektif dalam mengajar dan belajar.

Untuk memastikan bahwa standar pendidikan tercapai, Majelis Pendidikan menyusun program pelatihan dan pengembangan profesional bagi para pendidik. Ini termasuk pelatihan dalam metodologi pengajaran, manajemen kelas, dan penggunaan teknologi. Pengembangan profesional bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan guru, yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas pengajaran dan hasil belajar siswa.

¹⁷ Badrudin Badrudin et al., 'Standarisasi Pendidikan Nasional', *JIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 7, no. 2 (2024): 1797–1808.

¹⁸ Jejen Musfah, *Peningkatan Kompetensi Guru: Melalui Pelatihan dan Sumber Belajar Teori dan Praktik* (Kencana, 2012).

4. Pengembangan Fasilitas Pendidikan

Pada perencanaan pendidikan Islam, juga perlu memperhatikan faktor lingkungan dan sumber daya yang tersedia. Sumber daya yang dimaksud tidak hanya berupa sumber daya fisik seperti gedung dan perlengkapan sekolah, tetapi juga sumber daya manusia seperti guru dan tenaga kependidikan. Oleh karena itu, perencanaan pendidikan Islam juga melibatkan pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan fasilitas, dan infrastruktur pendidikan Islam.¹⁹ Perencanaan pendidikan Islam juga harus mengikuti perkembangan zaman dan teknologi yang semakin pesat. Oleh karena itu, penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran menjadi salah satu hal yang harus dipertimbangkan dalam perencanaan pendidikan Islam. Dengan memperhatikan faktor-faktor tersebut, diharapkan perencanaan pendidikan Islam dapat dijalankan dengan baik dan mencapai tujuan yang diinginkan. Majelis Pendidikan berperan dalam memastikan ketersediaan sumber daya yang diperlukan oleh lembaga pendidikan, seperti dana, fasilitas, dan teknologi. Penyediaan sumber daya yang memadai adalah kunci untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung dan memenuhi standar pendidikan yang diharapkan. Majelis Pendidikan berperan dalam pengembangan Fasilitas pendidikan seperti ruang kelas, perpustakaan, dan laboratorium. Fasilitas yang memadai dapat membantu meningkatkan standar pendidikan dengan memberikan lingkungan yang kondusif untuk belajar.

5. Evaluasi dan Akreditasi

Evaluasi adalah proses penilaian atau pengukuran terhadap suatu program, institusi, atau aktivitas untuk menentukan seberapa efektif atau efisien. Dalam setiap kegiatan evaluasi, langkah pertama yang harus diperhatikan adalah tujuan evaluasi. Penentuan tujuan evaluasi sangat bergantung pada jenis evaluasi yang digunakan, maka guru harus mengetahui dan memahami terlebih dahulu tentang tujuan dan fungsi evaluasi. Bila tidak maka guru akan mengalami kesulitan merencanakan dan melaksanakan evaluasi. Tujuan evaluasi pembelajaran adalah untuk mengetahui keefektifan dan efisiensi sistem pembelajaran, baik yang menyangkut tentang tujuan, materi, metode, media, sumber belajar, lingkungan maupun sistem penilaian itu sendiri. Tujuan khusus evaluasi pembelajaran disesuaikan dengan jenis evaluasi pembelajaran itu sendiri, seperti evaluasi perencanaan dan pengembangan, evaluasi monitoring, evaluasi dampak, evaluasi efisiensi- ekonomis, dan evaluasi program komprehensif.

akreditasi, sebagaimana dimaksud dalam peraturan pemerintah (Nomor 24 Tahun 2014 Bab I Pasal 1 butir (3), meliputi serangkaian kegiatan yang mengarah pada pengakuan formal oleh lembaga akreditasi. Proses verifikasi ini menegaskan bahwa suatu lembaga telah memenuhi kriteria sertifikasi pada bidang tertentu. Akreditasi menciptakan suatu lingkungan di mana, ketika suatu institusi terakreditasi, hal ini menumbuhkan kepercayaan dalam masyarakat, yang menandakan bahwa institusi pendidikan, termasuk sumber daya dan fasilitasnya, menjunjung tinggi komitmen terhadap kualitas pendidikan. Lebih jauh lagi, akreditasi menawarkan evaluasi dan penguatan kualitas atau efisiensi penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan pendidikan. akreditasi melibatkan evaluasi berdasarkan kriteria spesifik yang didasarkan pada fakta. Asesor melakukan penilaian tanpa manipulasi, mengamati realitas. Evaluasi keberlanjutan dan kinerja akademis selama akreditasi mencerminkan parameter yang disetujui oleh Badan Akreditasi Sekolah. Hasil tersebut diwujudkan melalui pengakuan peringkat kelayakan, sesuai pedoman yang

¹⁹ Muh Ibnu Sholeh S. HI M. Pd I Adab Penerbit, *MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM* (Penerbit Adab, n.d.).

dituangkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional mendefinisikan akreditasi adalah hasil keputusan resmi dan independen yang diperoleh dari lembaga luar berdasarkan standar khusus.

Akreditasi sekolah/madrasah berfungsi sebagai sarana penting untuk menyampaikan informasi mengenai kelayakan dan kualitas programnya. Selaras dengan standar pendidikan nasional, proses ini mencakup pengakuan peringkat kualifikasi dan memastikan jaminan kualitas untuk program atau satuan pendidikan yang terakreditasi. Sekolah yang terakreditasi akan memperoleh keuntungan besar dalam mencapai tujuannya, termasuk bantuan pemerintah, kontribusi dukungan swasta, dan berbagai bentuk bantuan. Oleh karena itu, akreditasi berfungsi sebagai pedoman bagi upaya peningkatan mutu dan penyusunan strategi pengembangan sekolah/madrasah.

Tujuan akreditasi adalah untuk menilai dan menjamin kualitas suatu lembaga atau program pendidikan sangatlah penting. Hal ini memastikan kepatuhan terhadap standar khusus yang ditetapkan oleh otoritas akreditasi, yang pada akhirnya meningkatkan kualitas pendidikan, menumbuhkan kepercayaan masyarakat, dan meletakkan dasar bagi peningkatan berkelanjutan. Proses akreditasi berfungsi untuk memberikan pandangan komprehensif mengenai kinerja pendidikan sekolah, bertindak sebagai panduan dan alat pengembangan untuk peningkatan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Menurut Antonius, akreditasi mengevaluasi kelayakan program dan satuan pendidikan formal dan nonformal pada berbagai jenjang dan jenis pendidikan.²⁰

Majelis Pendidikan melakukan evaluasi dan akreditasi terhadap institusi pendidikan untuk memastikan bahwa mereka memuunui standar pendidikan. Evaluasi pendidikan dengan memberikan reward dan punishment yang tepat. Pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pendidikan mencakup pemantauan implementasi kebijakan di lembaga pendidikan. Evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa standar yang ditetapkan dipatuhi dan efektivitas kebijakan dapat diukur. Proses evaluasi ini membantu dalam identifikasi kekuatan dan kelemahan dalam sistem pendidikan, sehingga tindakan perbaikan dapat dilakukan dengan tepat.²¹

6. Kerja Sama dengan Stakeholder

Majelis Pendidikan berperan dalam meningkatkan komunikasi dan kerja sama dengan stakeholde seperti orang tua, guru, dan perguruan tinggi. Kerja sama yang baik dengan membantu meningkatkan standar pendidikan dengan memberikan dukungan yang efektif. Terwujudnya pendidikan yang berkualitas dapat diwujudkan dengan kerjasama antar elemen baik pemerintah, swasta, dan masyarakat. Pelibatan masyarakat tidak hanya dalam bentuk bantuan fisik (capital) tetapi juga berwujud modal sosial (capital social) sebagai kunci bagi pembangunan dan pengembangan pendidikan yang berkualitas. Modal sosial adalah sumber daya yang dapat dipandang sebagai investasi untuk mendapatkan sumber daya baru. Seperti diketahui bahwa sesuatu yang disebut sumber daya (resources) adalah sesuatu yang dapat dipergunakan untuk dikonsumsi, disimpan dan diinvestasikan. Sumber daya yang digunakan untuk investasi disebut sebagai modal. Pada modal sosial lebih menekankan pada potensi kelompok dan antar

²⁰ 'Peran Akreditasi Dalam Meningkatkan Mutu Layanan Di Lembaga Pendidikan', *JUMPIS: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 1, no. 1 (29 December 2023): 11–23, <https://doi.org/10.53491/jumpis.v1i1.777>.

²¹ Meliza Meliza, Siraj Siraj, and Zahriyanti Zahriyanti, 'Implementasi Manajemen Kurikulum Merdeka Pada Sekolah Dasar Di Kabupaten Bireuen', *Jurnal Penelitian, Pendidikan Dan Pengajaran: JPPP* 5, no. 2 (2024): 127–68, <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/JPPG/article/view/17397>.

kelompok dengan ruang perhatian pada jaringan sosial, norma, nilai, dan kepercayaan antar sesama yang lahir dari anggota kelompok dan menjadi norma kelompok.²² Kolaborasi dengan berbagai pihak seperti pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat penting untuk meningkatkan standar pendidikan. Majelis Pendidikan dapat membangun kemitraan yang produktif untuk memperluas akses dan meningkatkan kualitas pendidikan.

Faktor penghambat dan pendukung yang memengaruhi peran majelis pendidikan dalam meningkatkan standar pendidikan:

a. Faktor Pendukung

- 1) Dukungan Kebijakan Pemerintah: Kebijakan yang propendidikan dari pemerintah dapat memperkuat peran majelis pendidikan.
- 2) Sumber Daya Manusia yang Berkualitas: Tenaga pengajar dan pengelola yang kompeten meningkatkan efektivitas majelis pendidikan.
- 3) Keterlibatan Masyarakat: Partisipasi orang tua dan masyarakat dapat mendorong keberhasilan program pendidikan.
- 4) Akses terhadap Teknologi: Penggunaan teknologi informasi dapat mempercepat proses pembelajaran dan administrasi pendidikan.
- 5) Kolaborasi dengan Lembaga Lain^{**}: Kerjasama dengan organisasi non-pemerintah, lembaga internasional, atau universitas dapat memperluas sumber daya dan pengetahuan.

b. Faktor Penghambat

- 1) Keterbatasan Anggaran: Pembiayaan yang tidak memadai dapat menghambat program dan inisiatif pendidikan.
- 2) Birokrasi yang Rumit: Proses administratif yang panjang dan rumit dapat memperlambat implementasi kebijakan.
- 3) Kurangnya Pelatihan dan Pengembangan: Minimnya program pelatihan untuk guru dan staf pendidikan dapat mengurangi kualitas pengajaran.
- 4) Ketersediaan Sumber Daya: Kekurangan fasilitas, buku, dan alat belajar yang memadai dapat menghambat proses belajar mengajar.
- 5) Ketidakstabilan Sosial atau Politik: Ketegangan sosial atau ketidakstabilan politik dapat mengganggu fokus dan perhatian pada pendidikan.

Dengan memahami faktor-faktor ini, majelis pendidikan dapat merumuskan strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan standar pendidikan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Majelis Pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam peningkatan standar pendidikan. Majelis Pendidikan dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan dengan memberikan kurikulum yang relevan, pengawasan kualitas, pelatihan guru, pengembangan fasilitas, evaluasi dan akreditasi, kerja sama dengan stakeholder, pengembangan teknologi pendidikan dan peningkatan kesadaran masyarakat. Pengawasan kualitas oleh Majelis Pendidikan dapat membantu meningkatkan prestasi siswa, karena siswa dapat memperoleh pendidikan yang lebih baik dan lebih berkualitas. Pelatihan guru yang diberikan oleh Majelis Pendidikan juga dapat meningkatkan kemampuan guru, sehingga dapat memberikan pendidikan yang lebih efektif. Kerja sama dengan stakeholder juga membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pendidikan, karena masyarakat dapat melihat bahwa sistem pendidikan dijalankan dengan baik dan efektif.

²² 'Modal Sosial Paguyuban Dalam Pengembangan Fasilitas Pendidikan Di Sekolah Dasar | Stepy | JPGI (Jurnal Penelitian Guru Indonesia)', accessed 6 September 2024, <https://jurnal.iicet.org/index.php/jpgi/article/view/503/510>.

Islamic Education Review
Vol 1, No 1, Juni 2024, ISSN 3064-4100

Pengembangan teknologi pendidikan oleh Majelis Pendidikan juga dapat membantu meningkatkan aksesibilitas pendidikan, sehingga siswa dari berbagai daerah dapat memperoleh pendidikan yang lebih baik dan berkualitas.

Simpulan

Majelis Pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan standar pendidikan di suatu daerah atau negara. Majelis Pendidikan bertanggung jawab dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan standar pendidikan, termasuk pengembangan kurikulum, pelatihan dan pengembangan guru, pengembangan fasilitas pendidikan, evaluasi dan akreditasi, serta kerja sama dengan stakeholder. Majelis Pendidikan memainkan peran penting dalam meningkatkan standar pendidikan melalui berbagai aspek. Pertama, mereka bertanggung jawab dalam pengembangan kurikulum yang relevan dan efektif, memastikan bahwa materi yang diajarkan sesuai dengan kebutuhan zaman. Selain itu, Majelis Pendidikan juga melakukan pengawasan kualitas pendidikan di suatu daerah atau negara, guna memastikan bahwa proses belajar mengajar berjalan dengan baik. Mereka memberikan pelatihan dan pengembangan guru untuk meningkatkan kemampuan mengajar, sehingga kualitas pendidikan dapat ditingkatkan. Dalam hal pengembangan fasilitas pendidikan, Majelis Pendidikan memastikan ketersediaan sumber daya yang diperlukan oleh lembaga pendidikan, seperti dana, fasilitas, dan teknologi yang memadai. Mereka juga melakukan evaluasi dan akreditasi terhadap institusi pendidikan untuk memastikan bahwa lembaga tersebut memenuhi standar yang ditetapkan. Terakhir, Majelis Pendidikan berperan dalam kerja sama dengan stakeholder, termasuk orang tua, guru, dan perguruan tinggi, guna meningkatkan komunikasi dan kolaborasi dalam pengembangan pendidikan. Dengan berbagai peran tersebut, Majelis Pendidikan berkontribusi signifikan dalam menciptakan lingkungan belajar yang berkualitas. Dalam meningkatkan standar pendidikan, Majelis Pendidikan dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan dengan memberikan kurikulum yang relevan, pengawasan kualitas, pelatihan guru, pengembangan fasilitas, evaluasi dan akreditasi, kerja sama dengan stakeholder, pengembangan teknologi pendidikan, dan peningkatan kesadaran masyarakat.

Daftar Pustaka

- Adab, Muh Ibnu Sholeh S. HI M. Pd I, Penerbit. *Manajemen Pendidikan Islam*. Penerbit Adab, n.d.
- Badrudin, Badrudin, Rana Setiana, Salma Fauziyyah, and Sri Ramdani. 'Standarisasi Pendidikan Nasional'. *JHIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 7, no. 2 (2024): 1797–1808.
- Fajri, Karima Nabila. 'Proses Pengembangan Kurikulum'. *Islamika* 1, no. 2 (2019): 35–48.
- Fathurrochman, Irwan, Tince Ajeng Yurika, Iis Sugianti, and Lukman Asha. 'Peran Majelis Pendidikan Dasar Dan Menengah Muhammadiyah Dalam Pengembangan Lembaga Pendidikan Di Kabupaten Kepahiang'. *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam* 14, no. 1 (2022): 201–25. <http://ejournal.iaida.ac.id/index.php/darussalam/article/view/1808>.
- 'Peran Majelis Pendidikan Dasar Dan Menengah Muhammadiyah Dalam Pengembangan Lembaga Pendidikan Di Kabupaten Kepahiang'. *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam* 14, no. 1 (2022): 201–25. <http://ejournal.iaida.ac.id/index.php/darussalam/article/view/1808>.
- Febrianti, Indri, and Makmur Syukri. 'Peran Akreditasi Dalam Meningkatkan Mutu Layanan Di Lembaga Pendidikan'. *JUMPIS: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 1, no. 1 (29 December 2023): 11–23. <https://doi.org/10.53491/jumpis.v1i1.777>.
- Hardian, Rafik Tri, and Hendro Widodo. 'Pengembangan Kurikulum Ismuba Di SMP Muhammadiyah Muntilan'. *Urwatul Wutsqo: Jurnal Studi Kependidikan Dan Keislaman* 12, no. 2 (2023): 338–51.
- Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik. 'Standar Nasional Pendidikan'. Jakarta. Departemen Pendidikan Nasional, 2005.
- Jejen Musfah. *Peningkatan Kompetensi Guru: Melalui Pelatihan dan Sumber Belajar Teori dan Praktik*. Kencana, 2012.
- Kuntoro, Alfian Tri. 'Manajemen Mutu Pendidikan Islam'. *Jurnal Kependidikan* 7, no. 1 (2019): 84–97.
- Majelis | Muhammadiyah. 'Majelis | Muhammadiyah'. Accessed 7 September 2024. <http://arsip.muhammadiyah.or.id/content-46-det-majelis.html>.
- 'Majelis Pendidikan dan Pengajaran Muhammadiyah'. In *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, 12 June 2023. https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Majelis_Pendidikan_dan_Pengajaran_Muhammadiyah&oldid=23668709.
- Meliza, Meliza, Siraj Siraj, and Zahriyanti Zahriyanti. 'Implementasi Manajemen Kurikulum Merdeka Pada Sekolah Dasar Di Kabupaten Bireuen'. *Jurnal Penelitian, Pendidikan Dan Pengajaran: JPPP* 5, no. 2 (2024): 127–68. <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/JPPG/article/view/17397>.

Islamic Education Review
Vol 1, No 1, Juni 2024, ISSN 3064-4100

- ‘Modal Sosial Paguyuban Dalam Pengembangan Fasilitas Pendidikan Di Sekolah Dasar | Stepy | JPGI (Jurnal Penelitian Guru Indonesia)’. Accessed 6 September 2024. <https://jurnal.iicet.org/index.php/jpgi/article/view/503/510>.
- Rahman, Abd. ‘Supervisi Dan Pengawasan Dalam Pendidikan’. *PILAR* 12, no. 2 (2021): 50–65.
- Sapdi, Rohmat Mulyana. ‘Peran Guru Dalam Membangun Pendidikan Karakter Di Era Society 5.0’. *Jurnal Basicedu* 7, no. 1 (2023): 993–1001. <https://jbasic.org/index.php/basicedu/article/view/4730>.
- Siregar, Diana Riski Sapitri. ‘Desain Pengembangan Kurikulum’. *Jurnal Mahasiswa Pendidikan* 2, no. 2 (2022): 146–57.
- Siswopranoto, Mokh Fakhruddin. ‘Standar Mutu Pendidikan’. *Al-Idaroh: Jurnal Studi Manajemen Pendidikan Islam* 6, no. 1 (17 March 2022): 17–29. <https://doi.org/10.54437/alidaroh.v6i1.372>.
- Sulastina, Ega Putri. ‘Dakwah Bi Al-Hal Karang Taruna Hubbul Watthan Di Desa Talang Empat Karang Tinggi Bengkulu Tengah’. UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2023. <http://repository.uinfasbengkulu.ac.id/id/eprint/1539>.
- Syaputra, Refi, Amiruddin Siahaan, and Candra Wijaya. ‘Manajemen Majelis Pendidikan Daerah (Mpd) Dalam Memberikan pelayanan Pendidikan Di Kota Subulussalam Provinsi Aceh’. *At-Tazakki: Jurnal Kajian Ilmu Pendidikan Islam Dan Humaniora* 2, no. 2 (2018): 235–48. <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/2962667>.
- Yuliana, Lia. ‘Peran Komite Sekolah Dalam Mewujudkan Sekolah Efektif’. *Jurnal Ilmiah WUNY* 18, no. 2 (2016): 1–116. <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1510777>
- Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2008. <https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=zG9sDAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA78&dq=metode+penelitian+kepustakaan+&ots=P99jhTESZy&sig=v5xD9hCtIECX2SKrZsg5ATzOgMo>.